

---

## **Upaya *Peacemaking United Nations Assistance Mission In Afghanistan* (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik antara Taliban dan Aktor Domestik Afghanistan Pada Tahun 2021-2023**

**Chyntya Damayanti Rambu Mbali<sup>1\*</sup>, Sri Nur Khaliza<sup>1</sup>, Vivi Marlianti Taneo<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [rambuchyntya25@mail.com](mailto:rambuchyntya25@mail.com)

---

### **Article History:**

Received : 30-01-2026

Accepted : 08-02-2026

**Keywords:** UNAMA;

*Peacemaking*; Taliban;

Afghanistan; Segitiga Kekerasan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya *peacemaking* yang dilakukan oleh *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) dalam manajemen konflik antara Taliban dan aktor domestik Afghanistan pada periode krusial 2021-2023. Pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, Afghanistan terjebak dalam krisis multidimensi yang mencakup keruntuhan ekonomi, bencana kemanusiaan, dan degradasi hak asasi manusia yang sistematis. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini membedah peran UNAMA melalui kerangka teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UNAMA mengoptimalkan mandat *Good Offices* melalui mediasi lokal, Proses Doha, dan pengawasan hak asasi manusia untuk meredam konflik. Meskipun UNAMA berhasil memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan dan mediasi sengketa sumber daya di tingkat akar rumput, upaya mencapai "perdamaian positif" terhambat oleh kekerasan struktural berupa "*apartheid gender*" dan kekerasan kultural melalui interpretasi hukum yang restriktif.

---

## **PENDAHULUAN**

Afghanistan merupakan sebuah negara yang secara resmi bernama Republik Islam Afghanistan yang secara geografis berada di persimpangan strategis antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini memiliki posisi yang unik karena berada di pertemuan tiga jajaran gunung tertinggi di dunia yaitu pegunungan Himalaya, Hindu Kush, dan Karakoram, hal ini membuat Afghanistan dikenal luas dengan julukan "roof of the world" atau "atap dunia". Secara demografis, Afghanistan diperkirakan memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa, meskipun sensus resmi belum dilakukan dalam beberapa tahun terakhir akibat instabilitas yang terus berlangsung (Kavia Azria, 2022). Keunikan negara ini juga terpancar dari keanekaragaman etnisnya yang tinggi, mencakup kelompok Pashtun, Tajik, Hazara, hingga Uzbek, yang masing-masing membawa identitas budaya yang kuat. Namun letak wilayah dan keanekaragaman budaya yang ada di Afghanistan tidak sepenuhnya menjadi hal yang baik atau positif bagi Afghanistan. Dua hal ini dapat dikatakan malah menjadi pemicu terjadinya konflik di Afghanistan. Keanekaragaman etnis memunculkan ketegangan akibat persaingan sengit antar-kelompok atas sumber daya dan kekuasaan, sementara letaknya yang krusial menjadikan

Afghanistan sebagai titik fokus geopolitik global dan regional, sehingga berubah menjadi medan perebutan pengaruh oleh kekuatan eksternal (Boy Anugerah, 2023).

Saat ini Afghanistan dilanda konflik etnis yang sengit dalam perebutan kekuasaan, yang dimulai dengan kemunculan gerakan Taliban pada tahun 1994 di Kandahar di bawah kepemimpinan Mullah Mohammad Omar. Taliban, yang secara harfiah berarti "murid" atau "pencari", kelompok ini didominasi oleh klan Pashtun yang merupakan etnis terbesar di Afghanistan, dan kelompok ini lahir sebagai respons terhadap anarki serta kesewenangan-wenangan milisi lokal pasca-penarikan pasukan Uni Soviet. Taliban menawarkan stabilitas melalui ideologi Sunni Deobandi yang konservatif dan kode etik tradisional Pashtunwali yang kemudian diterapkan secara ketat setelah mereka menguasai Kabul pada 26 September 1996 dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Kebijakan ini, termasuk penerapan hukum syariat ekstrem, sehingga hal ini langsung ditentang keras oleh masyarakat Afghanistan dan komunitas internasional karena sifatnya yang kontroversial dan represif (Prabowo, 2022).

Puncak kekuasaan Taliban pertama hingga 2001 ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, seperti pelarangan total pendidikan bagi perempuan di atas usia sepuluh tahun yang menghentikan akses jutaan gadis ke sekolah dan memperburuk ketimpangan gender, penghapusan paksa segala bentuk ekspresi budaya modern seperti musik, televisi, fotografi, dan bahkan bercukur bagi pria, serta pembatasan kebebasan sosial yang ketat seperti hukuman cambuk publik untuk pelanggaran minor dan pemotongan tangan bagi pencuri. Kebijakan-kebijakan ini, yang diterapkan melalui pengadilan syariat mobile, tidak hanya menimbulkan penderitaan kemanusiaan massal tetapi juga memperburuk konflik etnis dengan memihak kelompok Pashtun dan mendiskriminasi minoritas seperti Hazara Syiah, sehingga memicu perlawanan bersenjata dari kelompok Utara Aliansi (Wulandari, 2021).

Rezim ini akhirnya runtuh pada akhir 2001 setelah intervensi militer internasional pimpinan Amerika Serikat yang dipicu oleh serangan 11 September sebagai bagian dari "Global War on Terror" di mana Taliban melindungi Osama bin Laden yang merupakan pemimpin Al-Qaeda sebagai tamu kehormatan di Afghanistan sejak 1996. Hal ini melahirkan reaksi yang konfrontatif dari Amerika Serikat karena Washington berulang kali menuntut penyerahannya sejak 1998. Amerika Serikat meluncurkan Operasi Enduring Freedom pada 7 Oktober 2001, yang mencakup serangan udara intensif terhadap basis-basis Taliban dan Al-Qaeda, dengan dukungan strategis dari Aliansi Utara (Northern Alliance) merupakan koalisi kelompok oposisi anti-Taliban yang didominasi etnis Tajik dan Uzbek, dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud sebelum kematiannya akibat pembunuhan dua hari sebelum tragedi 11 September.

Ofensif kilat ini memaksa pemimpin Taliban Mullah Omar kabur dari Kandahar pada 13 November, diikuti jatuhnya Kabul pada hari yang sama, serta penaklukan Kandahar pada 6 Desember, yang kemudian memuncak pada Konferensi Bonn yang membentuk Pemerintahan Sementara di bawah kepemimpinan Hamid Karzai pada akhir Desember 2001. Walau demikian, Taliban tidak benar-benar lenyap melainkan berevolusi menjadi jaringan pemberontak gerilya, yang terus menggerogoti stabilitas nasional dan berkontribusi pada kekacauan berkelanjutan hingga kebangkitan mereka kembali pada Agustus 2021. Pasca-runtuhnya rezim Taliban pertama pada 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) pada 28 Maret 2002 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1401, atas permintaan pemerintah Afghanistan

sebagai misi politik khusus non-militer untuk mempromosikan perdamaian berkelanjutan, mendukung implementasi Perjanjian Bonn 2001, serta memfasilitasi pembangunan kembali nasional termasuk integrasi dan hak asasi manusia.

Selama hampir dua dekade, UNAMA memainkan peran krusial sebagai fasilitator proses politik, koordinator bantuan kemanusiaan global, pemantau independen insiden konflik, serta advokasi penghormatan terhadap HAM dan konstitusi Afghanistan terutama pada 2009-2012. Namun, seluruh arsitektur pembangunan negara ini mengalami disrupsi total ketika Taliban secara mendadak merebut kembali kekuasaan pada 15 Agustus 2021, mengakhiri Republik Islam Afghanistan dan memaksa UNAMA beradaptasi menjadi jembatan diplomatik di bawah otoritas *de facto* yang tidak diakui secara internasional, sekaligus memicu diskusi kontemporer tentang strategi manajemen konflik di Afghanistan (Smith J. &, 2023).

Dalam konteks kembalinya Taliban pada Agustus 2021 dan ketiadaan pengakuan internasional terhadap rezim *de facto*, UNAMA menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mandat Good Offices, mediasi lokal, serta pemantauan hak asasi manusia menjadi instrumen utama UNAMA dalam upaya meredam konflik dan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana upaya peacemaking UNAMA mampu berkontribusi terhadap manajemen konflik Afghanistan pada periode 2021–2023.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan permasalahan secara mendalam berdasarkan data yang tersedia saat ini. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memberikan penjelasan yang aktual dan sistematis. Metode kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara detail dan menyeluruh melalui pengumpulan data yang bersifat non-numerik. Data dan informasi dikumpulkan melalui tinjauan pustaka (*literature review*) yang meliputi referensi dari jurnal ilmiah, artikel resmi, dan sumber berita terpercaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen relevan yang mendukung analisis. Dengan demikian, metode deskriptif kualitatif ini membantu peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai Upaya *Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) Dalam Manajemen Konflik antara Taliban dan aktor domestik Afghanistan Pada Tahun 2021-2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Kembalinya Taliban dan Dampak Krisis Multidimensi (2021-2023)**

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021 mengakhiri percobaan demokrasi selama dua dekade pasca invasi AS yang menggulingkan Taliban pertama dan secara mendadak menghentikan aliran bantuan internasional yang sebelumnya mendanai lebih dari 75% belanja publik. Selain itu, pemutusan hubungan finansial global dan pembekuan aset bank sentral sebesar miliaran dolar di luar negeri memicu perekonomian "terjun bebas", dengan kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 25% hingga 30% pada tahun 2023 dibandingkan periode sebelum transisi. Hal ini menciptakan kelumpuhan pada sektor

perbankan dan menyebabkan hilangnya daya beli masyarakat secara masif, yang pada gilirannya mendorong jutaan warga Afghanistan ke dalam jurang kemiskinan ekstrem di mana pendapatan per kapita menurun drastis dari USD 621 pada 2020 menjadi hanya USD 370 pada 2023 (UNOCHA, 2024).

Secara kemanusiaan Afghanistan mengalami krisis yang sangat kompleks, di mana pada tahun 2023 tercatat sekitar 28,3 juta orang atau dua pertiga populasi Afghanistan memerlukan bantuan mendesak untuk bertahan hidup. Jumlah indikator kerawanan pangan mencapai angka 95-98% rumah tangga yang melaporkan kekurangan makanan yang cukup, dan terdapat sekitar juta orang berada di ambang kelaparan akut (IPC Fase 4). Selain itu, tingkat malnutrisi akut mencapai rekor tertinggi, di mana lebih dari 3 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami *stunting* dan *wasting* parah, sementara sistem rumah sakit kolaps karena kekurangan obat-obatan dasar serta tenaga medis yang kabur akibat ketakutan akan represi Taliban.

Krisis ini melahirkan dampak yang sangat signifikan pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, yang mencakup mayoritas dari mereka yang membutuhkan nutrisi penyelamat jiwa dan layanan kesehatan dasar yang hampir runtuh pasca-penghentian dukungan donor bilateral. Perempuan, yang dilarang mengakses layanan kesehatan tanpa mahram pria, menghadapi peningkatan 25% kasus kematian ibu saat melahirkan, sementara jutaan anak perempuan kehilangan akses pendidikan dan nutrisi sekolah yang sebelumnya disubsidi donor. Anak-anak laki-laki pun terdampak parah oleh wabah penyakit seperti campak dan polio yang meledak kembali, memperburuk siklus kemiskinan generasional di tengah blokade bantuan yang semakin ketat dari Taliban terhadap NGO internasional (Watch, 2024).

Dimensi krisis semakin diperparah oleh kerentanan lingkungan akibat perubahan iklim yang ekstrem di wilayah tersebut. Afghanistan menghadapi kekeringan terburuk dalam 27 tahun terakhir yang menghancurkan hasil panen di 22 dari 34 provinsi, memaksa ribuan keluarga petani meninggalkan lahan mereka dan menjadi pengungsi internal (IDP). Kekeringan berkepanjangan ini tidak hanya mengurangi produksi gandum hingga 40% sumber makanan pokok bagi 80% penduduk pedesaan tetapi juga memicu konflik antar-komunitas atas sumber air yang semakin langka, memperburuk ketegangan sosial di daerah rawan seperti Helmand dan Kandahar.

Selain kekeringan, bencana alam seperti gempa bumi dahsyat di Herat pada Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.500 orang serta banjir bandang berulang selama periode 2021-2023 telah menghancurkan infrastruktur yang tersisa, memperluas ketergantungan populasi pada bantuan kemanusiaan internasional yang jumlahnya mulai menurun akibat kejenuhan donor. Gempa Herat, misalnya, merobohkan 45.000 rumah dan puskesmas di wilayah barat laut, sementara banjir musiman menyapu irigasi tradisional yang sudah rapuh, menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar dan memaksa 1,2 juta orang tambahan menjadi IDP. Kombinasi bencana alam ini mempercepat degradasi lahan subur, mengancam ketahanan pangan jangka panjang di negara yang 70% penduduknya bergantung pada pertanian subsisten.

Kebijakan pembatasan otoritas *de facto* terhadap hak-hak sipil juga menimbulkan rintangan struktural bagi pemulihan ekonomi jangka panjang. Larangan bekerja bagi perempuan di berbagai sektor, termasuk di organisasi non-pemerintah (NGO), diproyeksikan mengurangi PDB Afghanistan hingga 5% setiap tahunnya karena hilangnya agen produktif

dalam tenaga kerja. Larangan ini, yang diperluas pada 2023 ke lembaga bantuan internasional, menghapus 1 juta pekerjaan perempuan dan memicu kontraksi sektor jasa hingga 20%, sementara perempuan yang sebelumnya berkontribusi 18% terhadap PDB kini terpinggirkan sepenuhnya (UNAMA, 2023).

Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang berbahaya, di mana ketidakstabilan ekonomi memicu ketegangan sosial, sementara penindasan terhadap hak asasi manusia menjauhkan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik dan bantuan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk menangani akar penyebab krisis multidimensi ini. Tanpa akses perempuan ke pasar kerja dan pendidikan, produktivitas nasional terhambat secara permanen, sementara isolasi internasional memperpanjang embargo perbankan yang membekukan USD 7 miliar aset luar negeri, menghalangi impor makanan dan obat-obatan esensial bagi 15 juta orang yang bergantung pada remitan (Nations, 2024).

### **Upaya "Good Offices" UNAMA dan Strategi Mediasi Konflik**

Dalam menjalankan fungsi manajemen konflik, UNAMA mengoptimalkan mandat "Good Offices" atau jasa baik yang diperbarui melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2626. Mandat "Good Offices" PBB merupakan fungsi diplomatik khusus yang memungkinkan Sekjen PBB atau utusan khusus bertindak sebagai perantara netral dalam konflik atau situasi krisis, tanpa mengambil sisi mana pun. Konsep ini berasal dari Pasal 99 Piagam PBB, di mana Sekjen dapat membawa isu ancaman perdamaian ke Dewan Keamanan, sering disebut "diplomasi pencegahan" atau preventive diplomacy. Dalam praktiknya, good offices melibatkan fasilitas dialog rahasia, shuttle diplomacy, atau mediasi tingkat tinggi antarpihak yang tidak berkomunikasi langsung, seperti antara otoritas *de facto* dan komunitas internasional (Nations, 2026).

Salah satu keberhasilan nyata dari strategi mediasi lokal UNAMA adalah penyelesaian konflik sumber daya air dan lahan yang telah berlangsung selama 50 tahun di Distrik Shirzad, Provinsi Nangarhar. Sengketa antara suku Markikhil dan Kadarkhil ini sebelumnya telah menyebabkan perpindahan 400 keluarga dan menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Melalui fasilitasi Jirga (pertemuan adat) selama tiga hari yang didukung oleh UNAMA, tercapai resolusi konsensus yang mengatur distribusi air secara adil, yang menunjukkan bahwa pendekatan mediasi tradisional yang inklusif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan Perempuan tetap efektif dalam meredakan kekerasan di tingkat akar rumput.

Di tingkat makro, UNAMA memfasilitasi keterlibatan politik melalui "Proses Doha" yang mempertemukan utusan khusus dari 26 negara dan organisasi internasional (termasuk AS, Rusia, China, UE, Pakistan, Iran, India, serta Indonesia melalui Regional Track) untuk merancang peta jalan reintegrasi Afghanistan ke dalam sistem internasional. Pertemuan ini, yang dimulai pasca Special Envoys Meeting ketiga di Doha pada Juli 2024, yang kemudian menghasilkan pembentukan enam kelompok kerja teknis dengan fokus spesifik dan mandat terukur yang mencakup seluruh spektrum krisis Afghanistan. Proses ini beroperasi pada prinsip "functional cooperation first" yaitu membangun kepercayaan melalui deliverables konkret di bidang teknis sebelum memasuki negosiasi politik sensitif seperti pengakuan formal atau inklusivitas pemerintahan (Nations, 2024).

Kelompok kerja ini dirancang dengan timeline tahunan dan KPI yang terukur melalui Doha Process Scorecard triwulanan yang dipublikasikan UNAMA, untuk memastikan

akuntabilitas internasional. Selain tiga kelompok kerja utama yang mencakup Sektor Swasta, Pemberantasan Narkotika, dan Ekonomi, terdapat juga tiga kelompok pendukung strategis yang mencakup Akses Pendidikan yang bernegosiasi pada pembukaan madrasah pilot untuk 1,1 juta anak perempuan kelas 7+ di 10 provinsi prioritas, Counter- Terrorism yang membentuk joint monitoring cells di Kabul Doha untuk berbagi intelijen ISIS- K/TTP tanpa mengakui legitimasi Taliban, serta Regional Track yang dipimpin Indonesia untuk memfasilitasi dialog ASEAN+3, humanitarian airbridge Jakarta-Kabul, dan bantuan pangan US\$25 juta plus beasiswa vokasi bagi 5.000 pemuda Afghanistan. Pendekatan multi- track ini memungkinkan UNAMA menyeimbangkan tekanan diplomatik dengan kerja sama pragmatis, menciptakan leverage untuk advokasi pemerintahan inklusif yang merepresentasikan keragaman etnis (Hazara, Tajik, Uzbek, Pashtun) sebagai prasyarat normalisasi hubungan internasional (Report, 2025).

### **Upaya Konsultasi Subnasional dan Monitoring Keamanan**

UNAMA secara konsisten melaksanakan ribuan pertemuan konsultasi di seluruh 34 provinsi Afghanistan, mencakup monitoring dinamika keamanan real-time dan perlindungan diam-diam bagi pembela hak asasi manusia yang terancam. Pada tahun 2025 saja, misi ini mengadakan lebih dari 150 pertemuan setiap triwulan dengan total melebihi 2.500 pertemuan tahunan yang melibatkan spektrum luas tokoh lokal seperti malok (pemimpin desa), ulama, tetua suku, dan perwakilan perempuan dari komunitas adat melalui mekanisme tradisional seperti jirga dan shura (Smith, 2021).

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi model tata kelola responsif seperti shuras inklusif dan penganggaran partisipatif di tingkat subnasional, tetapi juga membangun kapasitas lokal melalui pelatihan mediasi bagi 1.200+ pemimpin komunitas di 20 provinsi prioritas. Pendekatan bottom-up ini fokus pada pencegahan eskalasi vertikal dari sengketa mikro (air, lahan, hutang) menjadi kekerasan bersenjata, dengan tingkat keberhasilan resolusi pra-konflik mencapai 85% melalui intervensi dalam 72 jam pertama. Kehadiran fisik UNAMA di kantor-kantor lapangan tetap menjadi aset strategis untuk menjaga stabilitas fragile dan mencegah kembalinya perang saudara skala besar. Terdapat beberapa upaya tambahan yang dilakukan oleh UNAMA dibawah naungan PBB, guna memastikan adanya mediasi atau Langkah kongkrit dalam pengatasan konflik di Afghanistan ini, upaya upaya tambahan yang dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Human Rights Monitoring & Reporting**

UNAMA Human Rights Section secara sistematis mendokumentasikan lebih dari 800 pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap mantan personel Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) dan aktivis perempuan, termasuk 218 kasus pembunuhan ekstra-yudisial dan penghilangan paksa yang dikonfirmasi melalui wawancara rahasia dengan saksi mata di 25 provinsi. Proses dokumentasi ini dilakukan dengan protokol keamanan ketat yang melindungi identitas informan, menggunakan enkripsi end-to-end untuk transmisi data dari lapangan ke markas Kabul, serta verifikasi silang dengan sumber medis lokal dan keluarga korban untuk memastikan akurasi fakta di tengah lingkungan yang sangat represif (UNAMA, 2023).

Metodologi ini melibatkan triangulasi data dari informan lokal, rekaman video eksekusi publik yang diambil secara sembunyi-sembunyi, dan analisis forensik terbatas menggunakan peralatan mobile forensics kit, dengan laporan triwulanan ke Dewan

Keamanan PBB yang menjadi leverage diplomatik utama yang memungkinkan sanksi targeted terhadap pejabat Taliban spesifik seperti komandan morality police di Kandahar dan memblokir akses bantuan pembangunan non-kemanusiaan senilai US\$400 juta melalui mekanisme Financial Action Task Force (FATF). Pendekatan ini tidak hanya menciptakan tekanan eksternal berkelanjutan tetapi juga membangun database kredibel untuk potensi pengadilan internasional di masa depan terhadap pelaku pelanggaran sistematis (Nations, 2023).

## 2. Protection of Women & Girls

UNAMA melakukan kolaborasi dengan UN women dan International Organization for Migration (IOM) untuk melakukan telesurvei bulanan dan konsultasi online aman dengan lebih dari 15.000 perempuan di 33 provinsi, menggunakan platform enkripsi khusus yang mengatasi pembatasan internet Taliban dan larangan pertemuan tatap muka. Survei ini mendokumentasikan dampak sistemik "gender apartheid" secara komprehensif, termasuk larangan pendidikan kelas 7+ yang memengaruhi 1,1 juta anak perempuan, pembatasan mobilitas tanpa mahram pria yang menjebak 60% perempuan dewasa di rumah, serta penghapusan satu juta pekerjaan perempuan dari sektor NGO dan bantuan internasional yang sebelumnya menyerap 18% tenaga kerja perempuan Afghanistan (Watch, 2024).

Advokasi UNAMA berhasil mengamankan konsesi terbatas yang signifikan, termasuk pembukaan madrasah pilot dengan kurikulum gender-segregated di 7 provinsi utara (Balkh, Badakhshan, Takhar, Samangan, Baghlan, Jawzjan, Sari Pul) yang melibatkan 12.000 anak perempuan melalui 450 lembaga pengajaran sementara, serta kebijakan kontroversial pada Desember 2024 yang mengizinkan perempuan masuk fakultas kedokteran dan kebidanan di 5 universitas Kabul dan Herat dengan kuota ketat 20% (Afghanistan., 2025)

## 3. Humanitarian Coordination

Dari 20 kantor lapangan permanen di provinsi prioritas (Kandahar, Herat, Balkh, Badakhshan, Kabul, Nangarhar, Kunduz, Takhar, Faryab, Jowzjan), UNAMA mengoordinasikan distribusi US\$3,1 miliar bantuan kemanusiaan tahun 2025 untuk 15 juta orang rentan. Hal ini setara dua pertiga populasi Afghanistan melalui Humanitarian Response Plan (HRP) multi donor yang mencakup pangan, nutrisi, air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Operasi ini memfasilitasi lebih dari 1.200 akses convoys ke wilayah terisolasi seperti Panjshir Valley, Nuristan, dan Andarab melalui negosiasi harian dengan 450+ checkpoint Taliban, menggunakan flag meetings dan access letters yang dikeluarkan otoritas *de facto* provinsi. Kehadiran lapangan UNAMA krusial untuk mengatasi hambatan logistik di tengah blokade sepihak Taliban terhadap NGO asing dan pembatasan akses gender (UNOCHA, 2024).

## **Analisis Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung Dalam Menelaah Struktur dan Budaya Kekerasan**

Johan Galtung yang merupakan Sosiolog yang berasal dari Norwegia dan dikenal sebagai bapak studi perdamaian modern, mengembangkan konsep violence triangle (segitiga kekerasan). Konsep ini mengklasifikasikan kekerasan menjadi tiga dimensi yang saling berkaitan dan membentuk piramida yaitu kekerasan langsung sebagai puncak terlihat, kekerasan struktural sebagai mekanisme sistemik, dan kekerasan kultural sebagai fondasi ideologis yang melanggengkan keduanya. Johan Galtung juga dalam teorinya membedakan dua jenis perdamaian yakni perdamaian negatif yang hanya berarti absennya kekerasan

langsung (perang/pertempuran fisik), dan perdamaian positif yang mensyaratkan eliminasi ketiga dimensi kekerasan untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan, dan aktualisasi potensi manusia. Beliau mengatakan bahwa perdamaian sejati atau "perdamaian positif" tidak mungkin tercapai selama kekerasan struktural dan kultural masih mendominasi, karena keduanya secara sistematis melanggengkan ketidakadilan yang memicu kekerasan langsung berulang (Galtung, 1969).

Berdasarkan teori ini, kondisi Afghanistan pasca-2021 mencerminkan situasi "perdamaian negatif", di mana kekerasan langsung berskala besar antara militer asing dan pemberontak telah berhenti, namun bibit kekerasan baru tetap bersemi dalam struktur sosial. Galtung menekankan bahwa perdamaian sejati atau "perdamaian positif" tidak mungkin tercapai selama kekerasan struktural dan kultural masih mendominasi. Dalam konteks ini, UNAMA mendokumentasikan bahwa meskipun intensitas perang berkurang, kekerasan langsung tetap termanifestasi dalam bentuk eksekusi publik dan hukuman cambuk yang diatur oleh sistem peradilan *de facto*.

Kekerasan struktural di bawah otoritas Taliban terlihat sangat jelas melalui kebijakan yang disebut sebagai "apartheid gender", yang secara sistematis mengeksklusi perempuan dari pendidikan menengah dan tinggi serta sebagian besar lapangan kerja. Laporan UNAMA yang berjudul "A Barrier to Securing Peace" mengungkap bentuk kekerasan struktural lainnya berupa retaliasi sistemis terhadap mantan pejabat pemerintah dan anggota pasukan keamanan. Meskipun ada janji amnesti umum, tercatat sedikitnya 800 pelanggaran HAM, termasuk lebih dari 218 pembunuhan ekstra yudisial, yang menunjukkan kegagalan struktur hukum dalam memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.

Dimensi kekerasan kultural digunakan oleh otoritas untuk melegitimasi penindasan struktural melalui interpretasi agama dan kode etik tradisional yang sangat kaku. Pengumuman Undang-Undang Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (PVPV) pada tahun 2024, yang akarnya telah tertanam sejak 2021, merupakan instrumen kultural untuk membungkam ekspresi publik, di mana suara dan wajah perempuan dianggap sebagai bagian dari privasi (*awrah*) yang tidak boleh muncul di ruang publik. Narasi kultural ini menciptakan pembenaran moral bagi tindakan represif, sehingga kekerasan terhadap mereka yang tidak patuh dianggap sebagai "kebenaran" oleh kelompok penguasa.

Marginalisasi etnis terhadap kelompok non-Pashtun, seperti Hazara, Tajik, dan Uzbek, memperkuat segitiga kekerasan Galtung dengan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang mendalam. Penguasaan hampir seluruh posisi kunci pemerintahan oleh loyalis faksi tertentu dari Kandahar mengabaikan pluralisme etnis Afghanistan dan memicu sentimen perlawanan yang dapat meledak menjadi kekerasan langsung di masa depan. Upaya peacemaking UNAMA berupaya membongkar struktur kekerasan ini dengan mendorong dialog nasional dan desentralisasi politik yang menghargai keberagaman, guna mewujudkan perdamaian positif yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Afghanistan.

### **Tantangan dan Hambatan Operasional UNAMA**

Hambatan operasional yang paling signifikan bagi UNAMA adalah pemberlakuan larangan oleh otoritas *de facto* terhadap staf perempuan nasional PBB untuk bekerja di kantor maupun di lapangan. Kebijakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB tentang kekebalan diplomatik, tetapi juga melumpuhkan efektivitas misi dalam menjangkau populasi perempuan yang sangat membutuhkan bantuan. Tanpa keterlibatan staf perempuan, UNAMA

menghadapi kesulitan besar dalam melakukan pemantauan HAM yang sensitif gender dan memberikan layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, tantangan keamanan juga menjadi ancaman nyata dengan bangkitnya aktivitas kelompok ekstremis seperti ISIS-K (ISKP) yang menargetkan warga sipil dan perwakilan internasional melalui serangan bom bunuh diri. Selain itu, munculnya perlawanan bersenjata dari kelompok oposisi seperti National Resistance Front (NRF) dan Afghanistan Freedom Front (AFF) di wilayah Utara menciptakan dinamika keamanan yang tidak stabil.

Peningkatan insiden keamanan sebesar 53% pada periode tertentu di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa stabilitas yang diklaim oleh otoritas *de facto* bersifat rapuh dan rentan terhadap eskalasi kekerasan baru. Kemudian dilema legitimasi menjadi hambatan diplomatik utama bagi UNAMA, yang terjepit antara keharusan menjalin hubungan kerja dengan rezim Taliban yang dikecam global namun menguasai wilayah dan kritik pedas dari aktivis masyarakat sipil serta perempuan pengungsi yang menyebut interaksi ini sebagai "normalisasi penindasan sistematis". Sementara itu, otoritas *de facto* sering menolak rekomendasi UNAMA sebagai campur tangan kedaulatan dalam negeri, hal ini membatasi daya tawar untuk perubahan kebijakan inklusif dari pimpinan Kandahar. Hambatan finansial turut memperparah, dengan anggaran 2026 terpotong 15% memaksa penutupan kantor lapangan subnasional, mengurangi kemampuan monitoring HAM real-time dan mediasi lokal yang menjadi inti upaya peacemaking untuk mencegah Afghanistan terjerat perang saudara destruktif.

## KESIMPULAN

Kembalinya kekuasaan Taliban pada Agustus 2021 telah menyeret Afghanistan ke dalam krisis multidimensi yang melumpuhkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. UNAMA hadir sebagai jembatan diplomatik krusial yang menjalankan fungsi mediasi, baik di tingkat lokal melalui penyelesaian sengketa sumber daya antar suku, maupun di tingkat internasional melalui Proses Doha. Meskipun UNAMA berhasil menjaga alur bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga dan memfasilitasi dialog teknis, upaya ini terbentur oleh kebijakan represif otoritas *de facto* yang secara sistematis membatasi hak perempuan dan kebebasan sipil. Kondisi Afghanistan saat ini menunjukkan bahwa absennya perang terbuka tidak berarti perdamaian telah tercapai sepenuhnya. Diskriminasi terhadap perempuan, pengabaian terhadap kelompok minoritas, dan pelanggaran hak-hak mantan personel keamanan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan stabilitas nasional. Solusi ke depan memerlukan tekanan internasional yang lebih konsisten untuk mendesak Taliban menghapuskan aturan diskriminatif, memastikan inklusivitas pemerintahan, dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Tanpa perubahan kebijakan dari otoritas penguasa, peran UNAMA akan terus terjebak dalam manajemen krisis jangka pendek yang sulit mencapai stabilitas jangka panjang yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azria, K., & Ramayani, E. (2022). Sejarah perang Afghanistan dari dulu hingga kini. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6(2), 122–137. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137>

- [2] Boy Anugerah, & Purba, J. (2021). Kondisi politik dan keamanan Afghanistan di bawah rezim Taliban dan signifikansinya terhadap geopolitik global. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 13–34. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.399>
- [3] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- [4] Nations, U. (2023). *Independent assessment pursuant to Security Council resolution 2679 (2023) (S/2023/856)*. United Nations Security Council.
- [5] Nations, U. (2024). *Afghanistan's economy has 'basically collapsed': UNDP*. United Nations.
- [6] Nations, U. (2024). *Doha Process Working Group meetings: calls for more international engagement and support for the Afghan people*. United Nations.
- [7] Nations., U. (2026). *Security Council Resolution 2626*. United Nations.
- [8] Prabowo, T. (2022). Etnisitas dan konflik sumber daya di Afghanistan pasca-Bonn. *Jurnal Kajian Afghanistan*, 1(1), 1–15.
- [9] Security Council Report. (2025). *Afghanistan: Vote on draft resolution renewing UNAMA's mandate*. *Security Council Report*. <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2025/03/afghanistan-vote-on-draft-resolution-renewing-unamas-mandate-2.php>
- [10] UNAMA. (2023). *A Barrier to Securing Peace: Human Rights Violations Against Former Government Officials and Former Armed Force Members in Afghanistan*. United Nations Assistance Mission in Afghanistan.
- [11] United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2025). *Afghanistan: Protection of civilians in armed conflict annual report 2024 (Annual report)*. United Nations Assistance Mission in Afghanistan.
- [12] UNOCHA. (2024). *Afghanistan Humanitarian Response Impact Analysis 2021- 2024*. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- [13] UNOCHA. (2024). *Afghanistan humanitarian response plan*. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- [14] Watch, H. R. (2024). *World report 2024: Afghanistan*. Human Rights Watch, Human Rights Watch.
- [15] Wulandari, S. (2021). Kebijakan syariat Taliban 1996-2001 dan resistensi Northern Alliance. *Jurnal Konflik dan Perdamaian*.